1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Triwulan III (Juli–Sept) Tahun 2026

   1. Dinamika Inflasi Regional & Kabupaten/Kota (Triwulan III 2026)
      - Kondisi Makro Sulawesi Utara: Pada akhir Triwulan III (September 2026), Provinsi Sulawesi Utara tercatat mengalami tekanan inflasi yang cukup signifikan, bahkan menjadi salah satu wilayah dengan angka inflasi tahunan (*year-on-year/yoy*) tertinggi secara nasional, yakni menyentuh 7,59%.
      - Tekanan Bulanan (*Month-to-Month*): Memasuki September 2026, inflasi bulanan di Sulut tercatat di angka 3,53% (mtm). Lonjakan ini utamanya dipicu oleh faktor cuaca yang mempengaruhi produktivitas pertanian serta rantai pasok komoditas pangan hortikultura.

   Kondisi Spesifik Bolaang Mongondow Selatan: Sebagai bagian dari wilayah regional Sulawesi Utara, dinamika harga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan turut merasakan dampak pergerakan inflasi pangan regional tersebut. Pemerintah Kabupaten Bolsel bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memantau ketat stabilitas harga pasar guna meredam gejolak harga yang dirasakan masyarakat

   2. Perkembangan Harga Komoditas Utama

   Selama periode Juli hingga September 2026, pergerakan harga komoditas di pasaran (termasuk wilayah Bolaang Mongondow dan sekitarnya) diwarnai oleh beberapa komoditas utama penyumbang inflasi (*volatile foods*):

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

   Berikut adalah identifikasi permasalahan utama inflasi daerah yang kerap memengaruhi stabilitas harga di Kab. Bolsel pada periode Triwulan III:

   1. Dampak Musim Cuaca dan Produksi Pangan Lokal
      - Pola Cuaca dan Fluktuasi Panen: Triwulan III sering kali berada dalam periode transisi cuaca atau puncak musim kemarau di wilayah Sulawesi Utara. Hal ini memicu penurunan produktivitas komoditas hortikultura peka harga, seperti cabai rawit (rica), bawang merah, dan sayur-mayur.
      - Keterbatasan Produksi Mandiri: Meskipun Bolsel memiliki sektor pertanian dan perikanan, produksi komoditas tertentu belum sepenuhnya mampu mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat secara mandiri sepanjang tahun.
   2. Tantangan Rantai Pasok dan Ketergantungan Pasokan Luar Daerah
      - Ketergantungan Pasokan Antardaerah: Sebagian bahan pangan pokok dan bahan olahan masih disuplai dari daerah tetangga (seperti Kotamobagu, Gorontalo, atau Makassar).
      - Biaya Logistik & Transportasi: Jalur distribusi darat yang cukup jauh dari pusat distribusi utama Sulawesi Utara membuat keterlambatan pengiriman atau fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) berpotensi langsung menaikkan harga di tingkat konsumen akhir.
   3. Dinamika Sektor Perikanan Laut
      - Fluktuasi Pasokan Hasil Laut: Sebagai daerah pesisir, pasokan ikan segar sangat

dipengaruhi oleh gelombang laut dan kondisi cuaca di Teluk Tomini. Ketika gelombang tinggi terjadi pada TW3, aktivitas melaut nelayan terganggu sehingga pasokan ikan segar menurun dan memicu kenaikan harga komoditas perikanan.

4. Tingkat Efektivitas Akses Pasar Lokal
   - Pola Konsumsi dan Disparitas Harga: Terbatasnya sarana perdagangan skala besar dan pasar terpadu di beberapa wilayah kecamatan menyebabkan disparitas harga antar-desa/kecamatan.
   - Perilaku Spekulatif: Skala pasar lokal yang terbatas rentan terhadap fluktuasi stok akibat perilaku tengkulak atau perantara pedagang sebelum barang sampai ke pasar rakyat.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk menahan laju inflasi dan melindungi daya beli masyarakat selama Triwulan III 2026, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengimplementasikan beberapa langkah taktis:

- Sinergi GNPIP (Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan): Memperkuat kerja sama antar-daerah untuk memastikan kelancaran distribusi pasokan komoditas pangan strategis.
- Operasi Pasar & Pemantauan Rutin: Tim pengendali inflasi daerah secara berkala memantau langsung harga kebutuhan pokok di pasar-pasar rakyat (seperti Pasar Soguo dan pasar distrik lainnya) guna mengantisipasi spekulasi harga.
- Optimalisasi Anggaran: Penguatan alokasi belanja daerah pada P-APBD 2026 difokuskan untuk program-program prioritas kerakyatan serta penanganan ketahanan pangan.

Kerangka utama pelaksanaan kebijakan ini mengacu pada strategi 4K, yang dijabarkan dalam tindakan konkret di lapangan:

1. Keterjangkauan Harga

Langkah-langkah untuk memastikan harga bahan pangan pokok tetap berada dalam daya beli masyarakat:

Gerakan Pangan Murah (GPM) / Operasi Pasar: Penjualan bahan pangan pokok (beras, minyak goreng, gula, telur, cabai) dengan harga yang disubsidi atau harga acuan pemerintah langsung ke titik-titik pemukiman warga

2. Ketersediaan Pasokan

Upaya menjaga ketersediaan barang agar tidak terjadi kelangkaan pasokan:

- Kerjasama Antar Daerah (KAD): Mengikat kesepakatan pasokan (B2B atau G2G) antara daerah yang mengalami defisit komoditas tertentu dengan daerah produsen yang mengalami surplus.
- Penguatan Cadangan Pangan Daerah (CPD): Mengoptimalkan peran BUMD pangan atau Perum BULOG setempat untuk menyerap hasil panen petani lokal dan menyimpannya sebagai cadangan buffer stock.
- Gerakan Tanam Mandiri: Menggalakkan gerakan menanam bahan pangan cepat panen (seperti cabai rawit dan bawang) di lahan pekarangan rumah, sekolah, maupun lahan kosong milik pemerintah.

3. Kelancaran Distribusi

Langkah-langkah memperlancar arus barang dari produsen/pasar induk ke konsumen akhir:

- Digitalisasi & Pemetaan Rantai Pasok: Menggunakan sistem informasi harga dan stok untuk memantau titik-titik kemacetan atau hambatan distribusi.

4. Komunikasi Efektif

Membangun ekspektasi inflasi yang stabil di tingkat masyarakat dan pelaku usaha:

- Himbauan Belanja Bijak: Mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan panic buying (belanja berlebihan) saat terjadi kenaikan harga komoditas tertentu.
- Transparansi Informasi Harga: Menyediakan data harga bahan pokok harian yang dapat diakses publik melalui aplikasi/panel harga resmi (seperti SP2KP Kemendag atau sistem informasi harga daerah).
- Rapat Koordinasi Rutin TPID: Melaksanakan rapat evaluasi secara mingguan/bulanan (termasuk mengikuti Rakor Inflasi Nasional bersama Kemendagri) untuk merespons dinamika harga secara cepat.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Evaluasi Berdasarkan Kerangka Strategi 4K
2. Keterjangkauan Harga

TPIN

- Capaian & Keberhasilan:
  - Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar terbukti efektif meredam gejolak harga musiman (seperti cabai rawit/rica, minyak goreng, dan beras).
- Catatan Evaluasi:
  - Operasi pasar masih cenderung bersifat reaktif dan event-based (digelar saat terjadi lonjakan harga), belum sepenuhnya mampu menstabilkan harga dalam jangka panjang secara berkelanjutan.

1. Ketersediaan Pasokan

TPIN

- Capaian & Keberhasilan:
  - Kemitraan melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) (misalnya sinergi pasokan dengan wilayah tetangga seperti Kota Kotamobagu atau Kabupaten tetangga) membantu mengatasi defisit komoditas pangan pokok.
  - Pembagian bibit hortikultura kepada kelompok tani/masyarakat untuk mendorong gerakan tanam mandiri.
- Catatan Evaluasi:

ijespg

- Ketergantungan pasokan komoditas tertentu dari luar daerah masih tinggi akibat belum optimalnya kapasitas produksi hortikultura lokal.

Sebagian kesepakatan KAD memerlukan optimalisasi ke tahap Business-to-Business (B2B) yang lebih konkret dan berkelanjutan.

1. Kelancaran Distribusi
   - Capaian & Keberhasilan:
     - Pengalokasian Subsidi Ongkos Angkut (SOA) atau fasilitasi logistik membantu menekan beban biaya transportasi bahan pokok dari sentra produksi luar ke pasar lokal.
   - Catatan Evaluasi:
     - Aksesibilitas geografis Bolsel (terutama rantai pasok jalan darat pesisir) rentan terhadap cuaca ekstrem atau kenaikan biaya bahan bakar, yang berdampak langsung pada marjin pedagang/pengecer.
1. Komunikasi Efektif
   - Capaian & Keberhasilan:
     - Koordinasi rutin TPID Bolsel bersama Pemprov Sulut, Bank Indonesia, serta partisipasi aktif dalam Rakor Inflasi Mingguan Kemendagri.
   - Catatan Evaluasi:
     - Penyampaian data/informasi harga pangan harian kepada pedagang dan masyarakat di tingkat kecamatan/desa perlu ditingkatkan agar tidak terjadi spekulasi harga.
2. Matriks Evaluasi Kebijakan

Aspek Evaluasi	**Status / Capaian**	**Kendala Utama**	Rekomendasi Perbaikan
GPM & Intervensi Pasar	Baik (Efisien dalam jangka pendek)	Dampak kestabilan harga bersifat sementara	Mengintegrasikan GPM ke titik rantai pasok pasar tradisional secara berkala
KAD (Kerjasama Antar Daerah)	Terjalin MoU	Implementasi transaksi riil B2B belum berjalan maksimal	Memperkuat keterlibatan BUMD/koperasi sebagai offtaker resmi
Dukungan Anggaran (BTT/DAU)	Tersedia	Skema regulasi pencairan terkadang terkendala fleksibilitas waktu	Menyusun SOP penanganan darurat pangan agar pencairan BTT lebih responsif
Produksi Pangan Mandiri	Terus didorong	Skala produksi hortikultura lokal belum seragam	Pemetaan lahan produktif dan pendampingan teknologi pascapanen

3. Rekomendasi Strategis Pasca-Evaluasi

1. Penguatan Peran BUMD / Koperasi Pangan: Mendorong pembentukan atau optimalisasi BUMD lokal sebagai penyangga (buffer stock) komoditas pangan utama.
2. Optimalisasi Digitalisasi Rantai Pasok: Memanfaatkan Dasbor/Panel Harga Pangan secara real-time untuk memantau titik potensi kelangkaan barang di tingkat kecamatan.
3. Penguatan Fasilitas Pascapanen: Membangun fasilitas rantai dingin (cold storage) untuk komoditas mudah busuk (ikan segar dan cabai) guna mengantisipasi kelangkaan saat cuaca buruk.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

rekomendasi kebijakan inflasi di bolsel

   -

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dirancang untuk mengatasi tantangan struktural daerah pesisir, ketergantungan pasokan luar daerah, fluktuasi pasokan perikanan/hortikultura, serta dinamika distribusi BBM (terutama solar bagi nelayan/logistik).

Rekomendasi ini disusun secara komprehensif berdasarkan kerangka 4K (*Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif*) dan tata kelola anggaran daerah.

1. Jangka Pendek (Respons Cepat & Intervensi Langsung)

- Transformasi Gerakan Pangan Murah (GPM) Terjadwal:
  - Mengubah operasi pasar dari yang bersifat mendadak/reaktif menjadi jadwal rutin terpadu di pasar-pasar kecamatan (seperti Pasar Soguo) menjelang periode rawan gejolak harga (TW3 atau hari besar keagamaan).
  - Mengintegrasikan data DTKS untuk memastikan subsidi pangan murah tepat sasaran kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
- Subsidi Biaya Transportasi & Pasokan Logistik:
  - Mengoptimalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memberikan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) pada komoditas pangan esensial yang didatangkan dari sentra produksi tetangga (Kotamobagu, Gorontalo, Makassar).
- Prioritas Distribusi BBM bagi Nelayan & Angkutan Pangan:
  - Mengoordinasikan kuota dan distribusi solar bersubsidi di SPBU lokal agar kebutuhan nelayan melaut dan armada pengangkut pangan terjamin, meminimalkan fluktuasi harga ikan segar dan bahan pokok.

2. Jangka Menengah (Penguatan Struktur Rantai Pasok)

- Akselerasi Konkret Kerjasama Antar Daerah (KAD) B2B:
  - Mengembangkan KAD yang sudah ada dari sebatas kesepakatan antar-pemerintah (*G2G*) menjadi kesepakatan riil antarpelaku usaha (*Business-to-Business*).
  - Mendorong keterlibatan BUMD atau Koperasi Daerah sebagai perantara penyerap

(*offtaker*) pasokan cabai, bawang, dan beras.

- Pengembangan Sarana Pascapanen & Rantai Dingin (*Cold Storage*):
  - Membangun atau memfasilitasi *cold storage* kapasitas sedang untuk komoditas hasil laut dan hortikultura peka harga (cabai/rica) guna menampung surplus panen dan mencegah kelangkaan saat cuaca buruk di Teluk Tomini.
- Penguatan Gerakan Tanam Mandiri Hortikultura:
  - Mendorong pemanfaatan pekarangan (program *Pekarangan Pangan Lestari*) dan penyediaan bibit gratis cabai rawit/bawang merah di tingkat desa/kecamatan untuk menekan permintaan pasar harian.

3. Jangka Panjang (Kemandirian Pangan & Keberlanjutan)

- Pemetaan & Klasterisasi Kawasan Pertanian Lokal:
  - Mengidentifikasi dan memetakan zona potensi hortikultura lokal unggulan (seperti di wilayah Pinolosian) guna meningkatkan produksi mandiri secara bertahap.
- Digitalisasi Pemantauan Harga & Logistik:
  - Membangun *dashboard* pemantauan stok dan harga komoditas pangan harian terintegrasi berbasis desa/kecamatan agar potensi lonjakan harga terdeteksi lebih awal (*early warning system*).
- Fleksibilitas & Regulasi Anggaran BTT:
  - Menyusun Peraturan Bupati (Perbup) atau Standard Operating Procedure (SOP) pengerahan anggaran BTT khusus penanganan gejolak inflasi daerah agar pencairan anggaran intervensi pasar dapat berjalan cepat dan aman secara akuntabilitas audit.

Ringkasan Prioritas Matriks Rekomendasi

Pilar Strategi	Tindakan Utama	Target Hasil
Keterjangkauan Harga	Rutinisasi GPM + Subsidi Transportasi (SOA)	Menjaga harga beras, minyak, dan cabai tetap stabil
Ketersediaan Pasokan	KAD B2B + *Cold Storage* Perikanan/Hortikultura	Mencegah defisit stok saat gelombang tinggi/musim kemarau

Pilar Strategi	Tindakan Utama	Target Hasil
Kelancaran Distribusi	Pengawasan kuota Solar SPBU + Jalur logistik darat	Menjamin kelancaran angkutan pangan dan kapal nelayan
Komunikasi Efektif	Publikasi Panel Harga Harian + Rapat TPID Rutin	Mencegah ekspektasi inflasi negatif & *panic buying*